

MEMAHAMI PEMBANGUNAN SOSIAL DIBALIK PEMBANGUNAN WADUK LAMBO DI NUSA TENGGARA TIMUR: TINJAUAN SOSIOLOGIS

Komang Ariyanto¹, Hamzah Al Imran²

¹Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Indonesia

²Program Studi Teknik Pengairan, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Makassar,
Indonesia

Email: komangariyanto998@gmail.com

Submitted: 01-05-2023; Accepted: 21-07-2023; Published : 04-08-2023

ABSTRAK

Pembangunan waduk tidak hanya berdampak pada aspek fisik dan ekonomi suatu wilayah, tetapi juga pada masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Penting untuk memahami bagaimana pembangunan ini mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, seperti perubahan sosial, hubungan antarwarga, partisipasi sosial, konflik sosial, dan struktur sosial di sekitar waduk. Proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kadangkala menimbulkan reaksi masyarakat dalam bentuk penolakan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna pembangunan sosial dibalik pembangunan waduk Lambo di Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan sumber sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pembangunan sosial dalam kasus pembangunan waduk Lambo dapat dilakukan melalui pembangunan kultur, pembangunan struktur, dan pembangunan proses sosial agar perencanaan pembangunan ini terencana dengan matang dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat serta konflik antara pemerintah dan masyarakat maupun antar masyarakat dapat diredam. Pada kasus ini atau kasus serupa lainnya masyarakat harus lebih paham apa itu konsep pembangunan dan mengapa pembangunan dilakukan pemerintah, jika menurut masyarakat pembangunan akan berdampak negatif maka masyarakat harus berdiskusi langsung dengan pemerintah untuk menghindari konflik.

Kata kunci: Konflik, Pembangunan Sosial, Pembangunan Waduk, Perencanaan Pembangunan, Teori Struktural Fungsional

ABSTRACT

The construction of a reservoir not only impacts the physical and economic aspects of a region but also affects the communities living in its vicinity. It is important to understand how this development influences the social life of the people, including social changes, inter-community relations, social participation, social conflicts, and the social structure around the reservoir. Government-led development projects sometimes trigger community reactions in the form of resistance. Therefore, this research aims to examine the social significance behind the construction of Waduk Lambo in East Nusa Tenggara. This study employs secondary sources and data collection techniques through literature review. The research findings indicate that social development management in the case of Waduk Lambo construction can be achieved through cultural development, structural development, and social process development to ensure well-planned development and positive impacts on the community while mitigating conflicts between the government and the community or among different communities. In this case, or in similar cases, the community needs to understand the concept of development and why the government initiates it. If the community perceives negative impacts from the development, they should engage in direct discussions with the government to avoid conflicts.

Keywords: Conflict, Social Development, Reservoir Development, Development Planning, Structural Functional Theory

PENDAHULUAN

Penelitian ini hendak mengkaji tentang makna pembangunan sosial dibalik pembangunan waduk. Hubungan antara waduk dan pembangunan sosial telah terungkap dalam penelitian sebelumnya, dan peran penting bendungan besar dalam mempertahankan masyarakat telah diakui (Shi et al., 2019; Chen et al., 2016). Dengan demikian, dalam penelitian ini akan menguraikan kembali makna dari pembangunan waduk, khususnya waduk Lambo di Nusa Tenggara Timur. Kajian tentang dampak pembangunan Waduk Lambo memiliki nilai penting untuk pemahaman lokal dan memastikan keberlanjutan pembangunan.

Kajian soal pembangunan waduk dan pembangunan sosial itu penting. Pertama, pembangunan waduk tidak hanya berdampak pada aspek fisik dan ekonomi suatu wilayah, tetapi juga pada masyarakat yang tinggal di sekitarnya, mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, seperti perubahan sosial (Rahmayanti & Pinasti, 2018), hubungan antarwarga, dan struktur sosial di sekitar waduk (Lockie, 2007; Eisenstadt, 1980). Kedua, melibatkan masyarakat dalam pembangunan waduk adalah hal penting, dan makna pembangunan sosial dapat membantu memahami tingkat partisipasi dan dampaknya pada masyarakat lokal (Markowska et al., 2020). Terakhir, pembangunan waduk seringkali dapat menimbulkan konflik sosial, baik antara pemerintah dan masyarakat, maupun antara masyarakat dengan masyarakat lainnya (Goulet, 2010; Castillo & Silva, 2020). Kajian tentang makna pembangunan sosial dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada konflik dan membantu mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

Pembangunan waduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini merupakan salah satu program Nawacita Presiden Jokowi dilaksanakan sejumlah daerah di tanah air. Proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tak terkecuali pembangunan waduk, kadangkala menimbulkan reaksi masyarakat dalam bentuk penolakan. Pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah tak jarang justru menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat akibat hilangnya sumber-sumber pendapatan dan ruang hidup warga. Lebih lanjut, sebagaimana temuan Awaliyah (2017) menunjukkan bahwa adanya ketidakpuasan warga inilah yang

kemudian menjadi pemicu timbulnya resistensi masyarakat terhadap suatu kebijakan pembangunan.

Demikian pula dengan rencana pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo. Rencana pembangunan ini telah dimulai tahun 2001-2003 dari masa pemerintah Kabupaten Ngada. Rencana pembangunan Waduk lambo tahun 2015 ini merupakan kelanjutan dari rencana pembangunan tahun 2001 yang terhenti, karena penolakan masyarakat pada waktu itu. Rencana pembangunan waduk tahun 2001 tersebut dimaksudkan untuk mendukung pengembangan wilayah di dataran Mbay sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) di Indonesia (Wadu dkk., 2021).

Meskipun diprotes dan ditolak oleh masyarakat, pemerintah Kabupaten Nagekeo tetap berupaya untuk melanjutkan rencana pembangunan ini dengan harapan bahwa sikap protes dalam bentuk penolakan tersebut akan berubah melalui negosiasi dan sosialisasi. Harapan pemerintah bisa meredam protes dan penolakan masyarakat melalui negosiasi dan persuasi namun tidak terwujud, terbukti ketika setiap tahapan implementasi rencana pembangunan Waduk Lambo tidak dapat terealisasi karena direspon dengan aksi perlawanan. Usaha penolakan masyarakat terus dilakukan untuk menggagalkan mega proyek ini. Walaupun dalam perjalanannya harus berhadapan dengan tindakan represif-koersif. Namun hal itu membuat perlawanan masyarakat semakin masif, akibatnya mampu membuat terhambatnya seluruh tahapan rencana pembangunan Waduk Lambo.

Melalui artikel ilmiah ini, seperti yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengidentifikasi masalah pembangunan waduk Lambo (dalam konteks manajemen pembangunan sosial) karena fenomena pembangunan ini terus dipraktikkan di Indonesia dan memberikan pro dan kontra dari masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh menggunakan studi literatur. Studi literatur yaitu metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian (Ariyanto, 2022). Penelitian ini menggunakan

data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan internet yang terkait dengan topik penelitian.

Tahapan dalam studi literatur ini yaitu: 1) mendefinisikan makna kajian topik yang akan di-review, 2) mengidentifikasi bahan referensi yang relevan dan berkualitas melalui *Google Scholar*, 3) memilih beberapa referensi dari *Google Scholar* dan mengelompokannya berdasarkan kategori topik penelitian, 4) menyusun matriks informasi/matriks penelitian terdahulu dari artikel yang diperoleh, 5) menulis *review*, 6) menyimpulkan dan mengaplikasikan hasil *review*. Topik pada penelitian ini membahas tentang memahami pembangunan waduk Lambo melalui pisau analisis teori modernisasi dan pembangunan sosial. Dengan demikian, peneliti menggunakan kata kunci (*keyword*) referensi meliputi: “pembangunan waduk”, “pembangunan sosial”, “perencanaan pembangunan”, “modernisasi”, dan “struktural fungsional”. Kemudian, peneliti mencari referensi artikel dengan dibantu *software Publish or Perish versi 8* dengan jumlah rentang artikel kurang lebih 200 artikel dan menggunakan *Google Scholar* melalui tautan <https://scholar.google.co.id/>. Terakhir, peneliti memilih artikel yang relevan dari 200 artikel tersebut dan menyusun matriks penelitian terdahulu serta menyimpulkannya.

Penelitian ini tergolong penelitian perspektif karena berusaha untuk memberikan analisis terhadap kajian pembangunan dengan menggunakan teori/konsep sosiologis. Peneliti menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Miles, Huberman & Saldana (2014), yaitu: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Pembangunan Waduk Lambo

Pembangunan Waduk Lambo diusulkan kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo kepada Pemerintah Pusat pada tanggal 23 Juni 2015. Pengusulan pembangunan waduk ini bertujuan untuk: (a) memenuhi kebutuhan air baku di sebagian Kecamatan Aesea Selatan dan Perkotaan Mbay, (b) menyediakan air bagi irigasi pertanian, dan (c) Pembangkit Listrik Tenaga Air. Akan tetapi, masyarakat Rendubutowe sebagai lokasi rencana pembangunan waduk Lambo menolak pembangunan tersebut di lahan pertanian milik

mereka. Masyarakat menilai bahwa dibalik kehendak baik pemerintah, namun akan mengakibatkan (a) adanya memarjinalisasi yang dapat mengancam tatanan sosial budaya serta keberlangsungan hidup mereka. (b) sebagai upaya perampasan ruang hidup, karena pembangunan mega proyek infrastruktur waduk ini akan menenggelamkan lahan produktif dan perkampungan mereka.

Bentuk-bentuk penolakan masyarakat Adat Lambo terhadap rencana pembangunan Waduk Lambo: (a) melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Nagekeo pada tanggal 28 Oktober 2016, (b) menghadang tim survei dari Pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk tidak melakukan survei, dan (c) aksi buka dada yang dilakukan oleh ibu-ibu dalam menghadang tim survei. Bentuk perlawanan ini dilakukan secara kolektif oleh masyarakat Desa Rendubutowe. Selain itu masyarakat juga mengirim surat penolakan pembangunan Waduk Lambo kepada Gubernur NTT, Kementerian PU, dan Presiden Republik Indonesia. Tujuannya agar Pemda Nagekeo segera menghentikan pembangunan Waduk Lambo di Desa Rendubutowe.

Penyebab Resistensi Masyarakat Adat dalam Pembangunan Waduk Lambo

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya resistensi masyarakat adat Rendubutowe dalam pembangunan waduk Lambo tersebut yaitu:

1. Pendekatan kepada masyarakat yang kurang tepat

Resistensi masyarakat adat terhadap pembangunan waduk Lambo karena tidak adanya pendekatan yang bersifat budaya yang dilakukan pemerintah Daerah Nagekeo terhadap masyarakat adat.

2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat adat di Desa Rendubutowe sebagai lokasi rencana pembangunan Waduk Lambo

Adanya resistensi masyarakat adat terhadap pembanguna Waduk Lambo, karena kurangnya informasi yang diberikan pemerintah daerah Nagekeo kepada masyarakat yang diperkirakan terkena dampak pembangunan tersebut. Hal-hal yang perlu dijelaskan pemerintah daerah kepada masyarakat adat Rendubutowe adalah yang berkaitan dengan hak-hak mereka seperti ganti untung atas lahan mereka, bagaimana masyarakat yang

terdampak direlokasi, tempat-tempat ritual adat dan kuburan-kuburan nenek moyang yang harus dipindahkan, tetapi semuanya ini tidak pernah dijelaskan secara baik oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Hal-hal ini belum pernah dijelaskan dengan lengkap dan detail oleh pemerintah Daerah Nagekeo kepada masyarakat Desa Rendubutowe sebagai lokasi rencana pembangunan waduk tersebut.

3. Hilangnya tempat tinggal sebagai basis kultural

Masyarakat adat di Desa Rendubutowe menolak pembangunan Waduk Lambo, karena akan memisahkan mereka dari tempat tinggal (rumah) yang telah mereka diami secara turun-temurun.

4. Hilangnya lahan produktif

Sebenarnya pemerintah Daerah Nagekeo sampai saat dimulai kegiatan pengukuran lahan yang menjadi area pembangunan Waduk Lambo belum mempunyai konsep yang jelas tentang pergantian untung lahan-lahan masyarakat, relokasi masyarakatnya, bagaimana cara memindahkan tempat-tempat ritual masyarakat adat, dan kuburan-kuburan nenek moyang masyarakat adat Lambo.

Perspektif Teori Struktural Fungsional Parsons dalam Memahami Pembangunan Waduk Lambo

Dalam melihat pembangunan waduk Lambo, penulis menggunakan teori struktural fungsional dengan paradigma AGIL dari Talcott Parsons. Konsep kunci sistem sosial menurut Parsons adalah: aktor, interaksi, lingkungan, optimalisasi, kepuasan dan kultur (Parsons, 1977).

- a. *Adaptation/adaptasi*

Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Pembangunan waduk ini sebagai kebijakan baru yang mengharuskan masyarakat beradaptasi dengan pembangunan waduk ini, sehingga masyarakat akan menerima dampak positif yang ditimbulkannya. Adaptasi yang dilakukan masyarakat setelah pembangunan waduk selesai bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemulihan ekonomi masyarakat. Berdasarkan penelitian

Surjono (2015) masyarakat yang memilih bertahan di sekitar genangan telah melakukan adaptasi berkaitan dengan perubahan lingkungan yang semula tanah pertanian ke hamparan air waduk, sehingga pola matapencaharian, hubungan sosial, mobilitas mengalami perubahan yang signifikan. Yang mana juga tidak terlepas dari analisis sosial-ekonomi, sehingga diharapkan dalam penyesuaian ini, masyarakat dapat lebih patuh dalam menerima pembangunan waduk ini. Disinilah situasi yang sulit, memang, tidak semua masyarakat dapat melaksanakan adaptasi ini dengan baik, karena masih ada sebagian warga masyarakat yang tidak patuh dalam pembangunan waduk. Kita lihat saja bagaimana kedepannya, apakah dengan pembangunan waduk ini masyarakat bisa beradaptasi dengan lingkungan dan budaya baru.

- b. *Goal Attainment/pencapaian tujuan*

Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Upaya yang akan dilakukan pemerintah dalam perbaikan ekonomi di NTT, yaitu dengan kebijakan pembangunan waduk. Setelah masyarakat berhasil beradaptasi dengan hidup berdampingan dengan waduk ini, maka tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari sistem dan penerapan kebijakan pemerintah bisa saja sukses. Tidak menutup kemungkinan, kebijakan pembangunan waduk ini membuat pencapaian tujuan dari sistem yang dibangun itu menjadi bomerang. Bukannya malah memberikan kesejahteraan masyarakat, malah bisa saja mengakibatkan permasalahan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, memang penting untuk kita lakukan konsensus bersama terhadap goal attainment tersebut, antara masyarakat dan pemerintah. Keduanya harus berkolaborasi dalam pelaksanaannya.

- c. *Integration/integrasi*

Sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi penting lainnya, yaitu AGL. Kebijakan pembangunan waduk Lambo ini diharapkan akan dimanfaatkan sebagai peluang untuk menggali dan mendapatkan manfaatnya.

Misalnya untuk tempat rekreasi atau wisata, pembangkit listrik, kesemuanya itu bagian dari integrasi, sehingga pola-pola yang sudah ada seperti *Adaptation*, *Goal Attainment*, dan pemeliharaan pola dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian sebuah sistem yang ada tadi, dapat mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponen penting terlaksana. Lalu, bagaimana jika sistem yang dibangun dalam pembangunan ini tidak tercapai, atau tidak terintegrasi? Maka, kita bisa melihat dan menduga akan terjadi hal-hal yang buruk, seperti konflik agraria karena tanah yang dimiliki petani telah menjadi sempit atau bahkan hilang, dan ketegangan akan terjadi dalam masyarakat.

d. *Latency*/pemeliharaan pola

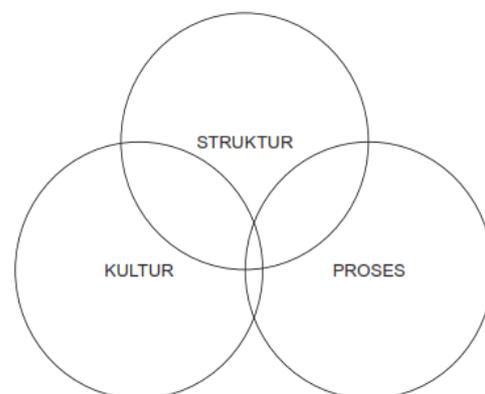
Sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara, dan memperbaiki. Baik secara motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi dalam pelaksanaan sistem tersebut. Dalam rencana pembangunan waduk Lambo, apakah sudah mendukung pola-pola yang ada pada masyarakat, seperti pelaksanaan kegiatan pertanian yang terus berjalan, dan lainnya. Dengan demikian, jika pola-pola itu belum terlaksana dengan baik, jangan sampai kebijakan ini menjadi bom waktu yang memberikan dampak buruk kepada masyarakat. Kepercayaan dan motivasi yang ada pada masyarakat tidak lagi bisa mempercayai kebijakan dari pemerintah yang dianggap lalai dalam mencegah dampaknya. Pengaruh kultur juga bisa menjadi bagian penting dalam penerapan kebijakan pembangunan waduk yang ada pada masyarakat kita, sehingga dalam realitasnya berjalan beriringan. Mari kita lihat kedepannya, bagaimana masyarakat akan melaksanakan dan merespon pembangunan waduk dalam kebijakan pemerintah.

Sesuai dengan perspektif fungsionalisme struktural, bahwa perubahan sosial antar sistem dalam struktur sosial masyarakat tidak terjadi secara radikal (seperti persepsi teori konflik), tetapi sedikit demi sedikit (evolusi), dalam menuju ke kondisi hubungan fungsional antarsistem baru yang teratur, integratif, dan seimbang. Keberhasilan mencari keseimbangan baru yang dilakukan masyarakat tersebut

tergantung dari adanya sikap empati dari faktor pengubah semula, yang berarti butuh kehadiran sistem-sistem baru dalam bentangan struktur sosial yang lebih besar, menuju pada kemanfaatan dampak pembangunan waduk Lambo untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih luas, dengan sedapat mungkin meminimalisasi dampak negatifnya.

Makna Pembangunan Waduk Lambo Secara Struktur, Kultur, Dan Proses Sosial

Terdapat tiga kategori makna pembangunan sosial, yaitu pembangunan sosial sebagai pengadaan pelayanan masyarakat, pembangunan sosial sebagai upaya terencana untuk mencapai tujuan sosial yang kompleks dan bervariasi, dan pembangunan sosial sebagai upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk berbuat. Midgley (1995: 38-41) mengajukan ada delapan aspek yang perlu diperhatikan dalam mengkaji pembangunan sosial, yaitu proses pembangunan sosial sangat terkait dengan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial secara khusus terinspirasi dari politik dan ekonomi, konsep pembangunan sosial lebih menekankan pada proses, proses perubahan yang progresif, proses pembangunan sosial bersifat intervensi, tujuan pembangunan sosial didukung dengan beberapa macam strategi, baik secara langsung maupun tidak langsung, pembangunan sosial lebih terkait dengan rakyat secara menyeluruh serta ruang lingkupnya lebih bersifat inklusif atau universal, dan tujuan pembangunan sosial adalah mengangkat kesejahteraan sosial.



Gambar 1. Pembangunan Sosial (Wirutomo, 2013)

Makna Pembangunan Waduk Lambo Secara Struktur, Kultur, dan Proses Sosial:

1. Pembangunan Struktur

Secara struktur; pembangunan waduk Lambo merupakan rencana pemerintah yang dimulai sejak tahun 2001 belum berjalan lancar karena terus-menerus mengalami persoalan yang sama yakni adanya penolakan dari masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan untuk mengalihfungsikan lahan milik masyarakat untuk dijadikan waduk belum bisa “memaksa” masyarakat agar berkenan mendukung tindakan pemerintah beserta program yang akan dijalankan. Maka seharusnya:

- a. Pemerintah harus membangun hubungan yang ramah dengan masyarakat menggunakan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan adat istiadat dan karakteristik masyarakat setempat; dan
- b. Dalam rangka menerapkan peraturan perundang-undangan sebagai acuan melakukan pembebasan lahan, harus disertai dengan adanya alternatif rekomendasi kebijakan lainnya.

2. Pembangunan Kultur

Kultur adalah segala sistem nilai, norma, sistem kepercayaan, adat istiadat, tradisi yang telah mendarah daging (*internalized*) pada individu/komunitas sehingga memiliki “kekuatan” membentuk keyakinan, pola berpikir, sikap dan perilaku anggota masyarakat.

- a. Berpegang teguh pada nilai-nilai adat dan warisan budaya leluhur pada wilayah mereka;
- b. Oleh masyarakat setempat dianggap menciptakan masalah baru yang dapat mengganggu tatanan kehidupan sosial masyarakat serta peluang kemiskinan baru;
- c. Diduga menghilangkan dan melenyapkan tempat-tempat ritual adat yang berada di dalam wilayah pembangunan waduk, sehingga dapat melunturkan dan merusak nilai-nilai peradaban lokal yang

diwarisi secara turun temurun hingga kini; dan

- d. Dipicu oleh masalah konflik agraria di masa lalu yaitu masalah tanah Natabadha.

Konsep *cultural development* adalah memberi hak hidup semua unsur budaya: “Multikulturalisme”; mengembangkan kualitas sistem nilai, norma, tradisi yang ada: primordialisme; menjadikan nilai ideal basis dari Pembangunan struktural (kebijakan, regulasi dan lain sebagainya); dan mengembangkan kondisi struktural (kebijakan/ peraturan) yang memacu kultur kreatif.

3. Pembangunan Proses Sosial

- a. Sosialisasi dari Pemerintah Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur (menjelaskan secara detail terkait apa maksud dan tujuan pembangunan bendungan ke warga desa); dan
- b. Pendekatan persuasif (melakukan pendekatan persuasif dan berkomunikasi bukan hanya kepada pejabat desa, tetapi kepada warga yang lahannya terkena dampak dari pembangunan bendungan).

SIMPULAN

Manajemen pembangunan sosial dalam kasus pembangunan waduk ini dapat dilakukan melalui pembangunan kultur, pembangunan struktur, dan pembangunan proses sosial agar perencanaan pembangunan ini terencana dengan matang dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat serta konflik antara pemerintah dan masyarakat maupun antar masyarakat dapat diredam.

Pembangunan waduk Lambo ini perlu memperhatikan prinsip *people centered development*, karena masyarakatlah yang menjadi penggerak pembangunan sekaligus menikmati manfaatnya. Pembangunan ini harus benar-benar merata, sesuai kebutuhan masyarakat, dan dinikmati oleh seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir orang atau golongan.

Saran untuk kedepannya jika ada kasus serupa bagi pemerintah, yaitu pemerintah diharapkan melakukan musyawarah perihal uang ganti rugi bersama seluruh kepala keluarga yang menerima dampak dan bukan hanya secara perwakilan (ketua RT/RW) agar lebih transparansi, bila perlu ada hitung di atas

putih; pemerintah memberikan langsung batuan kepada penerima tanpa melalui perantara agar tidak ada penyelewengan dana yang menyebabkan masyarakat berburuk sangka dengan pemerintah pusat; dan pemerintah diharapkan lebih kekeluargaan dalam penyelesaian masalah agar tidak ada korban lagi. Sedangkan, bagi warga masyarakat setempat yaitu warga dapat memanfaatkan waduk sebagai mata pencaharian baru, misalnya berjualan atau menyewakan perahu untuk wisatawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, K. (2022). Intervensi Pemerintah Desa dalam Program Pembangunan Pertanian: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik di Konteks UU Desa 2014. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 3(2), Article 2.
<https://doi.org/10.33830/jiapi.v3i2.108>
- Awaliyah, R. (2017). *Resistensi Masyarakat dalam Pembangunan Waduk Kuningan* [Other, Universitas Pendidikan Indonesia].
https://doi.org/10/S_SOS_1301169_Apendix.pdf
- Castillo, S. C., & Silva, C. P. (2020). How do environmental impact assessments fail to prevent social conflict? Government technologies in a dam project in Colombia. *Journal of Political Ecology*, 27(1), Article 1.
<https://doi.org/10.2458/v27i1.23223>
- Chen, J., Shi, H., Sivakumar, B., & Peart, M. R. (2016). Population, water, food, energy and dams. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 56, 18–28.
<https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.11.043>
- Eisenstadt, S. N. (1980). Cultural Orientations, Institutional Entrepreneurs, and Social Change: Comparative Analysis of Traditional Civilizations. *American Journal of Sociology*, 85(4), 840–869.
<https://doi.org/10.1086/227091>
- Goulet, D. (2010). Global Governance, Dam Conflicts, and Participation. In *Development Ethics*. Routledge.
- Lockie, S. (2007). Deliberation and Actor-Networks: The “Practical” Implications of Social Theory for the Assessment of Large Dams and Other Interventions. *Society & Natural Resources*, 20(9), 785–799.
<https://doi.org/10.1080/08941920701460317>
- Markowska, J., Szalińska, W., Dąbrowska, J., & Brząkała, M. (2020). The concept of a participatory approach to water management on a reservoir in response to wicked problems. *Journal of Environmental Management*, 259, 109626.
<https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.109626>
- Midgley, J. (1995). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. SAGE Publications.
https://books.google.co.id/books/about/Social_Development.html?id=5Ocr3qN8dyIC&redir_esc=y
- Parsons, T. (1977). *Social Systems and the Evolution of Action Theory*. New York: Free Press.
https://books.google.co.id/books/about/Social_systems_and_the_evolution_of_acti.html?id=nfO1AAAAIAAJ&redir_esc=y
- Rahmayanti, Y. D., & Pinasti, V. I. S. (2018). Dampak Keberadaan Objek Wisata Waduk Sermo terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat di Sremo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *E-Societas*, 7(2), Article 2.
<https://journal.student.uny.ac.id/index.php/societas/article/view/12527>
- Shi, H., Chen, J., Liu, S., & Sivakumar, B. (2019). The Role of Large Dams in Promoting Economic Development under the Pressure of Population Growth. *Sustainability*, 11(10), Article 10.
<https://doi.org/10.3390/su11102965>
- Surjono, G. (2015). Social Change of Downstream Triangle Community as an Impact of Kedungombo Dam Development. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 14(2), Article 2.
<https://doi.org/10.31105/jpks.v14i2.1322>
- Wadu, J., Lake, P., & Pita, C. (2021). Resistensi Masyarakat Adat dalam Pembangunan Waduk Lambo di Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), Article 2.
<http://publikasi.undana.ac.id/index.php/>

jap/article/view/a619
Wirutomo, P. (2013). Mencari Makna
Pembangunan Sosial: Studi Kasus
Sektor Informal di Kota Solo.
Masyarakat Jurnal Sosiologi, 18(1),
101–120.
<https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.3735>